

DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI GELAR RAKORNIS LPSE KAB/KOTA SE-PROVINSI JAMBI



Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ir. Nurachmat Herlambang, MMA menyebutkan bahwa Pengadaan barang dan jasa sangat penting karena berdampak pada proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rakornis LPSE Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Senin (15/07) bertempat di Grand Hotel Jambi.

Herlambang menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan negara, setiap tahun miliaran hingga triliunan rupiah dialokasikan anggaran untuk belanja barang/jasa. "Pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Jambi harus dikawal bersama, agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya. "Saya ingin pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan baik, begitupun dengan pelayanan pengadaannya juga harus dikawal bersama secara elektronik agar tepat sasaran," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Herlambang juga menjelaskan bahwa salah satu fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah dengan meningkatkan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa. "Saya berharap Rakornis ini mampu mendorong percepatan pembentukan dan tata kelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang permanen struktural pada pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi," tandasnya.

Selain itu, Herlambang mengingatkan agar selalu waspada pada proses pengadaan yang berpotensi menimbulkan penipuan segitiga yaitu dorongan atau tekanan, rasionalitas, dan peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk itulah, diperlukan peningkatan profesionalisme dan integritas SDM. Disamping itu, Kasubdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan LKPP RI, Januar Indra, dalam sesi wawancara menjelaskan bahwa saat ini paradigma kelembagaan pengadaan barang dan jasa telah berubah pasca terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Agar data dan informasi lebih akurat, efektif, dan efisien, data dan informasi yang selama ini dikerjakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara terpisah, kedepan akan diintegrasikan dan dibentuk biro atau badan yang menaungi layanan pengadaan barang dan jasa tersebut, hal ini dimaksudkan agar data-data dan informasi lebih efektif dan efisien," jelasnya. Turut hadir pada acara tersebut peserta yang berasal dari Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi serta narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Jauhar Muchlas.